

ABSTRAK

Perubahan yang mana adanya perubahan pengurangan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian hasil hutan kayu terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus atau dengan kata lain masyarakat sekitar hutan. Seyogianya hal tersebut malah menimbulkan celah untuk terjadinya peningkatan angka perusakan hutan dan penurunan kondisi kelestarian lingkungan hutan akibat dari pencurian yang dilakukan tanpa adanya tindakan yang memberikan efek jera terhadap pelaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah statute approach artinya pendekatan yang memandang peraturan perundang-undangan. Objek kajian berupa bahan hukum primer yakni menelaah beberapa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder hasil penelitian yakni buku, jurnal, skripsi dan artikel ilmiah, bahan hukum sekunder yakni kamus hukum, ensiklopedia, pengumpul bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui media online internet. Analisa bahan hukum deskriptif.

Terdapat ketidaktepatan perubahan sanksi bagi masyarakat sekitar hutan yang melakukan pencurian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 17A yang merumuskan sanksi administratif dapat dikenakan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di hutan apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, c dan d dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perbuatan tersebut dilakukan selama minimal 5 (lima) tahun.

Kata Kunci: Pencurian kayu- sanksi administratif- masyarakat sekitar hutan

Abstrack

Changes in which there is a change in the reduction of sanctions imposed on perpetrators of theft of timber forest products against people who live in and/or around forest areas for a minimum of 5 (five) years continuously or in other words, communities around the forest. This should actually create a gap for an increase in the rate of forest destruction and a decrease in forest environmental conditions as a result of theft carried out without any action that has a deterrent effect on the perpetrators.

The type of research used in writing the thesis is normative, and the approach used is the statute approach, meaning an approach that looks at the laws and regulations. The object of study is in the form of primary legal materials, namely reviewing several related laws and regulations, secondary legal materials resulting from research, namely books, junla, thesis and scientific articles, secondary legal materials, namely legal dictionaries, encyclopedias, collecting legal materials through library studies and through online media. Internet. Analysis of descriptive legal materials.

There is an inaccuracy in the change in sanctions for forest communities who commit theft according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Article 17A which formulates administrative sanctions can be imposed on people living in the forest if they violate Article 17 paragraph (2) letters b, c and d in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the act is carried out for a minimum of 5 (five) years. five years.

Keywords: thimber theft- administration of sanctions- society

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABTRACK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan.....	12
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II.....	14
2.1 Perusakan Hutan Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia.....	14
2.2 Tindak Pidana dan Tindak Pidana Terhadap Kehutanan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	16
2.2.1 Tindak Pidana.....	16

2.2.2 Tindak Pidana Terhadap Kehutanan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.	
a. Undang-undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.....	16
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Pengrusakan Hutan.....	18
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerj.....	22
2.3 Kriminalisasi dan Dekriminalisasi	
2.3.1 Pengertian Kriminalisasi.....	30
2.3.2 Dekreminalisasi dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.....	32
2.4 Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan	
2.4.1 Sanksi Pidana.....	33
2.4.2 Tujuan Pemidanaan	34
BAB III.....	38
3.1 Pentingnya Keberadaan Hutan di Indonesia.....	38
3.2 Dampak Negatif Perusakan Hutan di Indonesia.....	40
3.3 Beberapa Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan Di Indonesia.....	42
3.3.1 Perbuatan Perusakan Hutan Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	45
3.3.2 Ketentuan Ancaman Sanksi dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	49

3.4 Beberapa Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	52
3.5 Dekriminalisasi Pencurian Kayu Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjaa.....	58
3.5 Ketidaktepatan Pengenaan Sanksi terhadap Masyarakat Sekitar Hutan yang Melakukan Pencurian Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	61
BAB IV.....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	